

	pertemuan terbuka						
4.	Daftar Hasil Penelitian	Tim Kordik dan KEPK	Sekretaris KEPK	Setiap Ada Kegiatan	Hard & Soft File	2 tahun	Web Tim Koordinasi Pendidikan

III. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI (PERIHAL)	PEJABAT YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat	Para Kabag/ Kabid	Tim K3RS	2022	Hard & Soft File	2 tahun	Web RSUD Temanggung

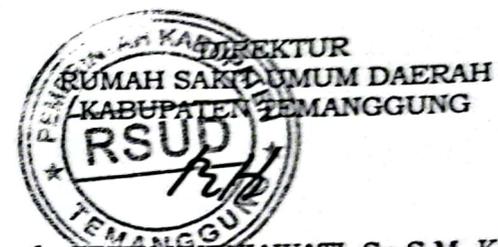
IV. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Biodata Elektronik PNS (database)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Melindung hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	-Mengungkapkan data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Melindung hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	- Mengungkapkan data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Identitas PNS yang Melanggar Disiplin dan Dijatuhi Hukuman Disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Melindung hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	- Mengungkapkan data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

		- PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS				
4	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/ perkawinan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	- Mengungkapkan data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen
6	Dokumen Penawaran Kontrak	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I - Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan	Untuk menjamin persaingan usaha sehat	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa selesai	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian
7	- Laporan hasil pemeriksaan reguler - Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus - Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus - Review Laporan Keuangan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I - PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah - Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah, Lampiran I BAB Norma Pelaporan huruf A	- LHP jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan - LHP belum bersifat final	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

8	SPJ Kegiatan	UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan	Menghindari audit keuangan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Sampai diaudit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan	Audit Keuangan dilakukan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang
9	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf J - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Menghindari munculnya penilaian yang tidak objektif terhadap proses pengadaan barang dan jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa	Informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
10	Internet Protocol/ IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak Terbatas	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga melindungi hak akses
11	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	-	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
12	Sistem Manajemen Database	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf J - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE	Menjaga keamanan database	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database
13	Rekam Medis	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H angka 2 dan huruf J - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 12 dan 13	Melindungi rahasia pribadi pasien Rumah Sakit terkait kondisi kesehatan dan fisik	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang

14	Data Hutang Pasien Kepada RS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Menjaga kerahasiaan terkait kondisi keuangan seseorang	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang
----	------------------------------	---	--	----------------	---	---



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S M. Kes
Pembina
NIP.19760401 200312 2 010